

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA



TRIWULAN III
2025

STASIUN KIPM BAUBAU
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2025 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun Anggaran 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Baubau (SKIPM Baubau) ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian Isi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025 adalah Target Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025 beserta realisasinya.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja SKIPM Baubau di masa mendatang.



Baubau, Oktober 2025
Kepala SKIPM Baubau

YUNI IRAWATI WIJAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR	ISI ii
.....	DAFTAR iii
GAMBAR	iv
DAFTAR	TABEL v
1. PENDAHULUAN	DAFTAR 1
LAMPIRAN BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
2 PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 VISI DAN MISI	5
2.2 SASARAN KINERJA	5
3 AKUNTABILITAS KINERJA	7
3.1 CAPAIAN KINERJA	7
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI	9
3.3 REALISASI ANGGARAN	18
4. PENUTUP	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tugas dan Fungsi BPPMHKP	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPPMHKP	2
Gambar 3. Struktur Organisasi SKIPM Baubau 2025	4
Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP	5
Gambar 5. Tangkapan Layar ekinerjaku.kkp.go.id	7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025	6
Tabel 2.	Rincian Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM Baubau Tahun 2025	6
Tabel 3.	Capaian Kinerja SKIPM Baubau Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2025	8
Tabel 4.	Capaian IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	10
Tabel 5.	Capaian Kegiatan Surveilans CBIB yang telah dilaksanakan pada Triwulan III	10
Tabel 6.	Capaian IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	13
Tabel 7.	Capaian IK 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	14
Tabel 8.	Capaian IK 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	15
Tabel 9.	Capaian IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau.....	16
Tabel 10.	Capaian IK 6. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau	17
Tabel 11.	Capaian IK 7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	18
Tabel 12.	Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2025	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 SKIPM Baubau .	22
Lampiran 2. Rincian Target Indikator Kinerja	25
Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan SKIPM Kendari Triwulan III Tahun 2025	25
Lampiran 4. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	26
Lampiran 5. Tangkapan Layar www.kinerjaku.kkp.go.id	27
Lampiran 6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.....	28

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Baubau merupakan kepanjangan tangan dari BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Baubau dituntut untuk melaksanakan secara, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban SKIPM Baubau dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu juga sebagai sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja SKIPM Baubau. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai Eselon I dari UPT SKIPM Baubau adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tugas dan Fungsi BPPMHKP

Sedangkan Struktur Organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi BPPMHKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, SKIPM Baubau mempunyai tugas pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan mutu hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, SKIPM Baubau menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pengujian terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- b) pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
- c) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- d) penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- e) pengumpulan, pengolahan data dan informasi pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
- f) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKIPM Baubau, Kepala Stasiun dibantu oleh Plt. Kepala Urusan Umum dan Jabatan Fungsional. Total jumlah seluruh pegawai sebanyak 25 orang dengan rincian 11 ASN (10 orang PNS dan 1 orang PPPK), 10 PPNP masuk database BKN dan 4 orang PJLP. Dari jumlah 11 ASN tersebut 8 orang diantaranya adalah pejabat fungsional Inspektur Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (7 PNS dan 1 orang PPPK), 1 orang Fungsional APK APBN, 2 orang Fungsional Umum.

STRUKTUR ORGANISASI SKIPM BAUBAU TAHUN 2025



Gambar 3. Struktur Organisasi SKIPM Baubau 2025

PERENCANAAN KINERJA



2.1. VISI DAN MISI

Visi dan misi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Visi, Misi dan Tujuan BPPMHKP

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah mengendalikan dan mengawasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk menjamin mutu hasil perikanan nasional.

2.2. SASARAN KINERJA

Untuk mendukung tercapainya tujuan BPPMHKP, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP, SKIPM Baubau menetapkan Sasaran Kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja SKIPM Baubau Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU			
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
	2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
	3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	99
SK.2 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100
	5.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	87
	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	85
	7.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88

Rencana Kerja dan Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja pembangunan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang sudah di targetkan. Alokasi anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 3.005.080.000,- (Tiga Milyar Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).

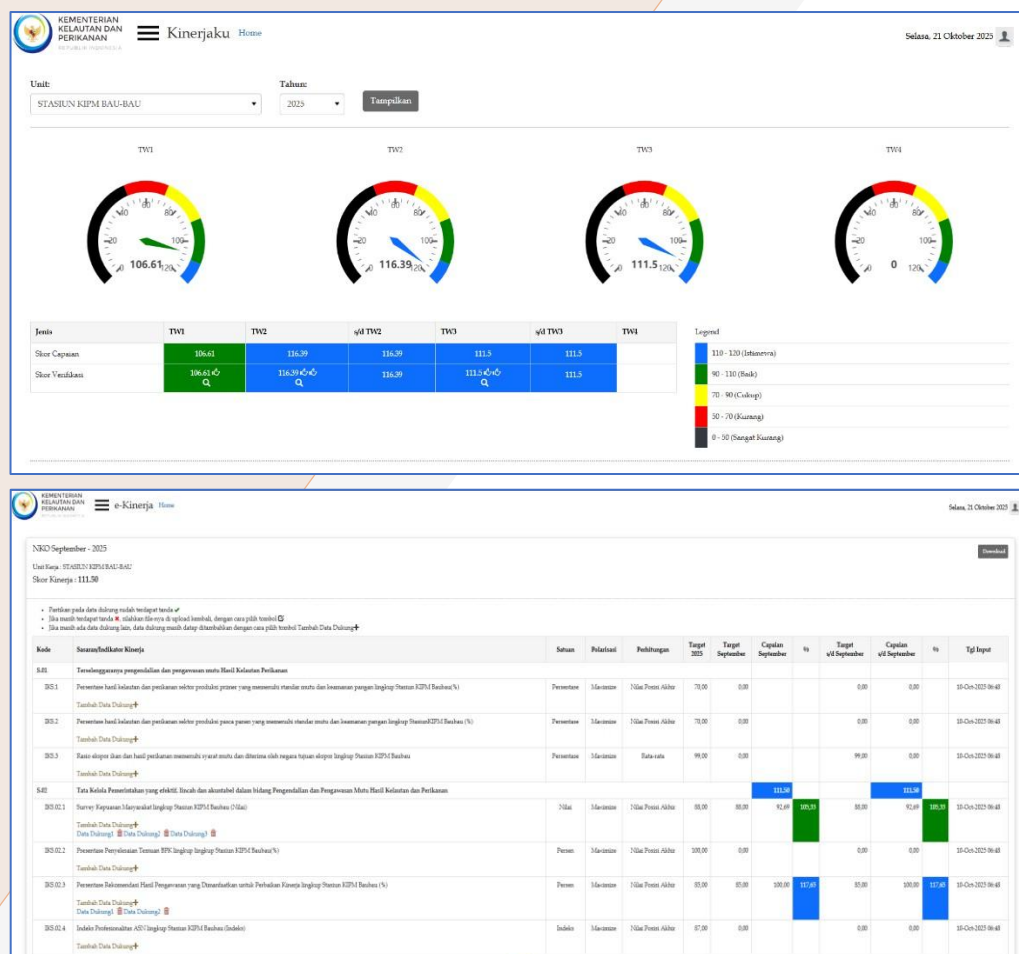
Tabel 2. Rincian Rencana Kerja dan Anggaran SKIPM Baubau Tahun 2025.

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.848.140.000,-
2.	Manajemen Mutu	-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	156.940.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025		3.005.080.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja SKIPM Baubau Triwulan III 2025 sudah baik, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111.5 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id



Gambar 5. Tangkapan Layar ekinerjaku.kkp.go.id

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama tahun 2025. Adapun capaian kinerja triwulan I,II dan III tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Capaian Kinerja SKIPM Baubau Triwulan I,II dan III Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	REALISASI			
		TARGET TAHUNAN	TW I	TW II	TW III
1 Terselenggara nya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70			
	2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70		100	
	3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	99	100		
2 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100			
	5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	87		84,8	
	6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	85	100	100	100
	7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88	93,92	94,70	92,69

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Strategis : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- Standar Nasional Indonesia (SNI)
- Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Tabel 4. Capaian IK 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	0	0	0

Pada Triwulan III ini untuk IKU Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau tidak ada target dan juga belum ada realisasi. Progres untuk IKU ini adalah telah dilaksanakannya kegiatan surveilan terhadap 11 (sebelas) Pembudidaya Ikan pemegang Sertifikat CBIB yang telah disertifikasi sebelumnya. Adapun data pembudidaya yang telah dilakukan surveilan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Capaian Kegiatan Surveilan CBIB yang telah dilaksanakan pada Triwulan III.

No	Nama Pembudidaya	Alamat	Nomer Sertifikat CBIB	Tanggal Surveilan	Keterangan
1	Bapak Ramlan Farm	Desa Dampala, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000775	05 Agustus 2025	Udang Vannamei
2	La Ode Darman K Farm	Desa Dampala Jaya, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000782	05 Agustus 2025	Udang Vannamei
3	Bapak Muhajrin	Desa Dampala, Kecamatan Kalisusu Barat, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000773	05 Agustus 2025	Udang Vannamei

4	Bapak Amrin Farm	Desa Lapan Dewa, Kecamatan Kalisusu Barat	ID - CBIB - SG - P - 000776	05 Agustus 2025	Udang Vannamei
5	Muh. Nawawi farm	Desa Tri Wacu-Wacu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000780	12 Agustus 2025	Udang Vannamei
6	Bapak Sudirman Farm	Desa Tri Wacu-wacu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000799	12 Agustus 2025	Udang Vannamei
7	Bapak Mukmin farm	Desa Tri Wacu-Wacu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000786	12 Agustus 2025	Udang Vannamei
8	Wayan Agustawa farm	Desa Tri Wacu-Wacu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000777	12 Agustus 2025	Udang Vannamei
9.	Bapak Ali Murtopo Farm	Desa Tri Wacu-wacu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000785	12 Agustus 2025	Udang Vannamei
10	Muhammad Jadil Farm	Desa Lipu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000783	19 Agustus 2025	Udang Vannamei
11	La Ode Uslimin Farm	Desa Rante Gola, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara	ID - CBIB - SG - P - 000778	26 Agustus 2025	Udang Vannamei

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan

standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

- 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
- 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Tabel 6. Capaian IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	0	0	0

Pada Triwulan III ini untuk IKU Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau tidak ada target maupun realisasi yang dicapai.

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi

persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Tabel 7. Capaian IK 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% Thd Target
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	0	0	0

Sesuai tabel di atas, untuk Triwulan III ini capaian IKU 3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau tidak ada target dan capaian.

Sasaran Strategis : Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

IK 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern

Tabel 8. Capaian IK 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)

Indikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% Thd Target
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	0	0	0

IKU 4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Baubau (%) ini merupakan capaian tahunan dan di triwulan ini tidak ada target.

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN Kriteria pengukuran indeks profesionalitas ASN mencakup: - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi

Kinerja - Dimensi Disiplin. Pada Tahun 2025, target indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau sebesar 87 % dan pengukurannya akan dilakukan setiap semester dalam setiap tahunnya.

Tabel 9. Capaian IK 5. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% Thd Target
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Baubau	0	0	0

IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau merupakan target semesteran sehingga pada Triwulan III tidak ada target maupun realisasi. Realisasi capaian IKU ini akan dilaporkan lagi di semester 2 atau triwulan IV.

IK 6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Baubau

Penghitungan persentase rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (baik bentuk LHP Audit, Relu dan Evaluasi) yang terbit pada Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPPMHKP menjadi objek pengawasan. Indikator persentase hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja diukur dengan membandingkan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan, dengan rumus perhitungan sebagai

$$\%_{kasus} = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

berikut:

Keterangan :

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang

telah ditindaklanjuti

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal yang diberikan

Target indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja pada Tahun 2025 adalah sebesar 85 % dengan realisasi di Triwulan III sebesar 100 % sehingga persentase capaian terhadap target sebesar 117,6% dan dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Capaian IK 6. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau

Indikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup SKIPM Baubau	85	100	117,6

IK 7. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di SKIPM Baubau menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT BPPMHKP.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT BPPMHKP. Capaian untuk IK 7. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Capaian IK 7. Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)

Indikator Kinerja	Target TW III 2025	Realisasi TW III	% Thd Target
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88	92,69	105,33

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Baubau pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar Rp. 3.005.080.000 (Tiga Milyar Lima Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah). Namun dengan adanya perubahan organisasi, anggaran tersebut digabung dengan anggaran satker SKIPM Kendari dengan total anggaran seluruhnya sebesar Rp. 8,203,239,000 (Delapan Milyar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). Pada Triwulan III ada pergeseran pagu Belanja Pegawai antar satker pada eselon I sebesar Rp 186,983,000,- dari Rp 4,483,494,000 menjadi Rp 4,296,511,000 sehingga Total anggaran menjadi Rp 8,016,256,000,- (Delapan Milyar Enam Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Realisasi penyerapan anggaran untuk anggaran SKIPM Baubau tidak dapat dilaporkan secara terpisah dengan realisasi anggaran SKIPM Kendari dikarenakan SKIPM Baubau tidak lagi mengelola anggaran sendiri. Adapun realisasi anggaran seluruhnya untuk satker SKIPM Baubau dan SKIPM Kendari untuk Triwulan III tahun

2025 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja untuk SKIPM Baubau dan SKIPM Kendari Triwulan III Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	4,296,511,000	2,806,944,926	65,33
2.	Belanja Barang	3,719,745,000	1,388,402,974	37,33
3.	Belanja Modal	0	0	0
	TOTAL	8,016,256,000	4,195,347,900	52,34

PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, SKIPM Baubau telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum terealisasi.

Beberapa IKU yang belum terealisasi lebih disebabkan oleh target pelaksanaannya yang bukan terealisasi pada Triwulan III ini melainkan pada triwulan berikutnya atau merupakan target tahunan sesuai target IKU masing-masing.

Dalam merealisasikan target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang berisi 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama, SKIPM Baubau tidak menghadapi hambatan dan masalah yang berat, seluruh program dan kegiatan dapat dijalankan dengan baik.

Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang diantaranya:

1. Dalam hal penentuan target dan indikator kinerja utama diperlukan komunikasi yang intens untuk mendapatkan angka yang realistis dan indikator kinerja yang lebih terukur.
2. Perlu dilakukan relaksasi terhadap manual IKU untuk memudahkan UPT dalam hal pengukuran hasil kinerja.
3. Perlu adanya koordinasi dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan antar pusat, daerah dan instansi lintas sektoral secara intensif dan berkelanjutan agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai perencanaan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Triwulan III SKIPM Baubau Tahun 2025 ini dapat menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala SKIPM Baubau kepada Kepala BPPMHKP dan Menteri

Kelautan dan Perikanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

Lampiran 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 SKIPM Baubau



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
 JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEFON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuni Irawati Wijaya**
 Jabatan : **Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau



Ditandatangani Secara Elektronik

Yuni Irawati Wijaya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	70
		3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Baubau	99
SK.2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	100
		5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Baubau (Indeks)	87
		6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Baubau (%)	85
		7. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Baubau (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	2.848.140.000
2.	Manajemen Mutu	-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	156.940.000
Total Anggaran Stasiun KIPM Baubau Tahun 2025		3.005.080.000

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Baubau



Ditandatangani Secara Elektronik

Yuni Irawati Wijaya

Lampiran 2. Rincian Target Indikator Kinerja

RENCANA AKSI																	
STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAUBAU																	
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN																	
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
2025																	
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kegiatan Pendukung	Satuan Komponen	Target Output/ Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hasil Kelautan dan Perikanan	Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan kemandirian pangan lingkup SKIPM Baubau (%)	Sertifikasi CBIB pada Pembudidayaan Ikan/ Sertifikasi CPIB Pembenihan	%	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	
		Sertifikasi CPIB Kapal Perikanan															
		Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)	%	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
		Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	%	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
		Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)	%	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70
2 Tatalaksana pemerintahan yang efektif, linah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu	Presentase ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup SKIPM Baubau	Survei ke UPI dalam rangka official control	Nilai	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	
		Dukungan Manajemen	%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Layanan Manajemen Keuangan															
		Indeks Profesionalitas ASN lingkup SKIPM Baubau (Indeks)	Indeks	87	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	87
		Bimtek Sertifikasi produk pada sektor produksi pasca panen	%	85	-	-	-	85	-	85	-	-	85	-	-	-	85
	Presentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Baubau (%)	Bimtek Sertifikasi Produksi Primer	%	85	-	-	-	85	-	85	-	-	85	-	-	85	
		Dukungan Manajemen	%	85	-	-	-	85	-	85	-	-	85	-	-	-	85
		Layanan Manajemen Keuangan	%	85	-	-	-	85	-	85	-	-	85	-	-	-	85
		Survey Kepuasan Masyarakat lingkup SKIPM Baubau (Nilai)	Nilai	88	-	-	88	-	-	88	-	-	88	-	-	-	88
		Layanan Umum, Sosialisasi dan Koordinasi	Nilai	88	-	-	88	-	-	88	-	-	88	-	-	-	88



Baubau, Januari 2025

Kepala

Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P

NIP. 196906091998032002



Baubau, Januari 2025

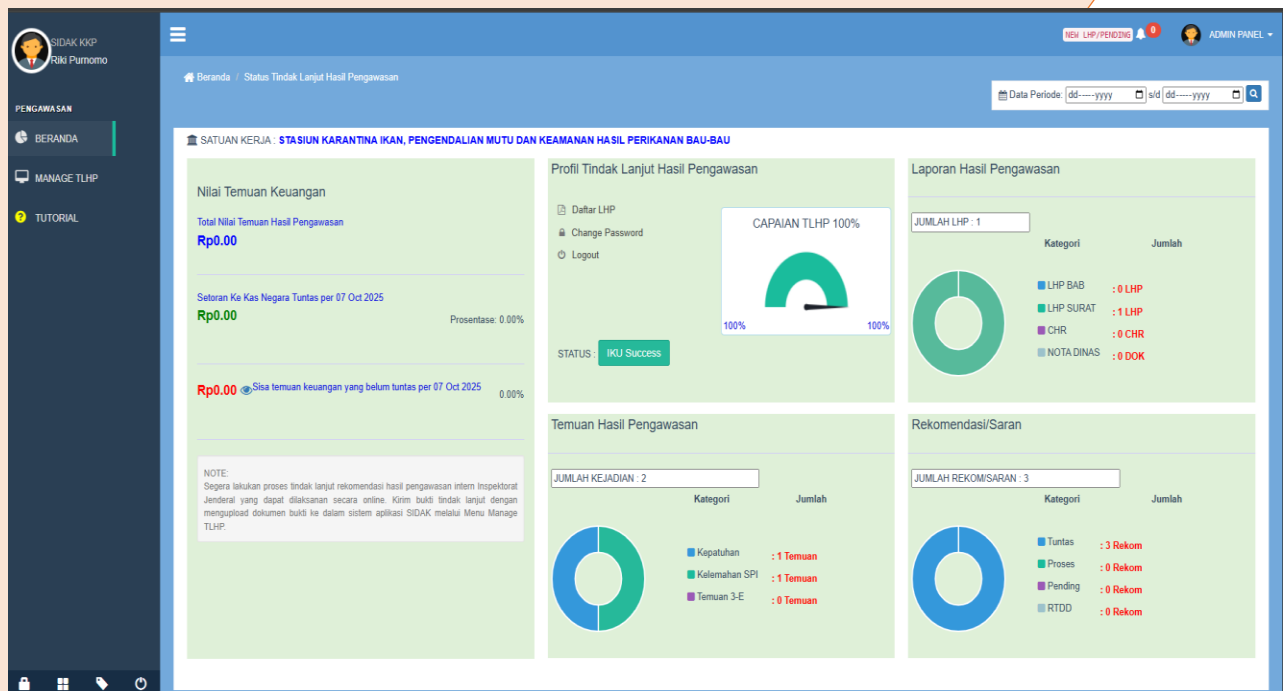
epala

Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P
NIP. 196906091998032002

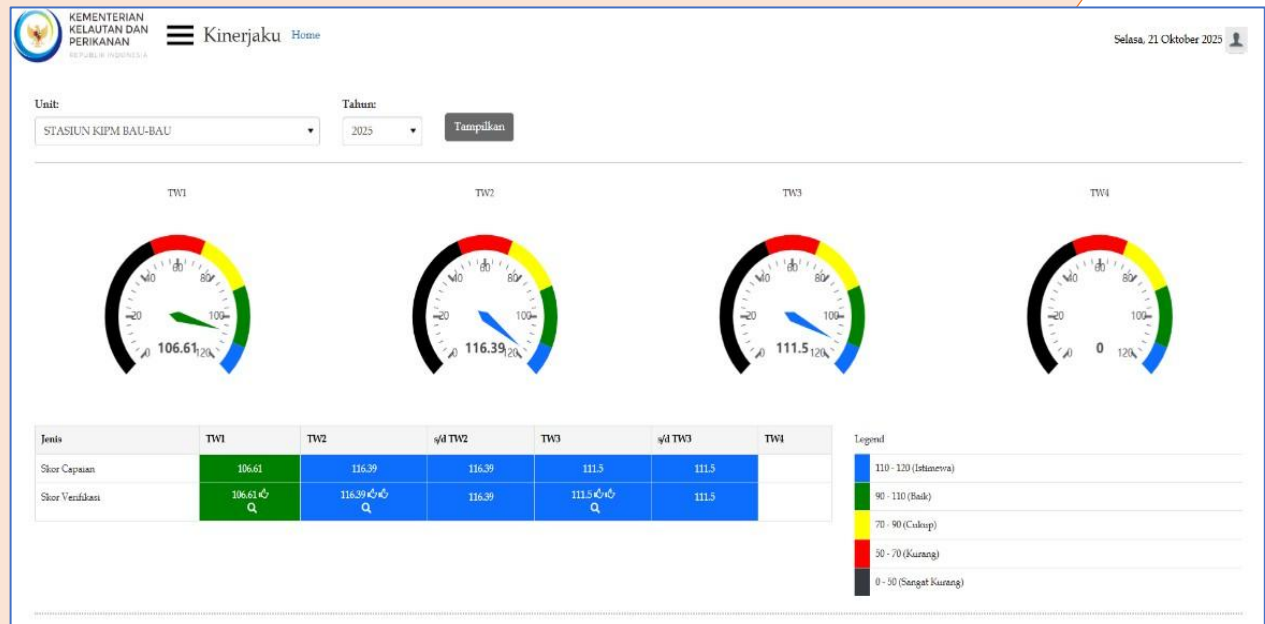
Lampiran 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja per Kegiatan SKIPM Kendari Triwulan III Tahun 2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA												
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I KENDARI												
REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA												
Bulan : 01 s.d. 09												
NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	567694 STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	PAGU	4,296,511,000	3,719,745,000	0	0	0	0	0	0	0	8,016,256,000
		REALISASI	2,806,944,926 (65.33%)	1,388,402,974 (37.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4,195,347,900 (52.34%)
		SISA	1,489,566,074	2,331,342,026	0	0	0	0	0	0	0	3,820,908,100
GRAND TOTAL		PAGU	4,296,511,000	3,719,745,000	0	0	0	0	0	0	0	8,016,256,000
		REALISASI	2,806,944,926 (65.33%)	1,388,402,974 (37.33%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	4,195,347,900 (52.34%)
		SISA	1,489,566,074	2,331,342,026	0	0	0	0	0	0	0	3,820,908,100

Lampiran 4. Tangkapan Layar Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan



Lampiran 5. Tangkapan Layar www.kinerjaku.kkp.go.id



Lampiran 6. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat

